

## IDENTIFIKASI FAKTOR PENENTU KESIAPAN DAERAH DI INDONESIA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: STUDI KASUS KALIMANTAN TIMUR

**Lukman Yudho Prakoso**

Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

**Abstrak.** Hingga saat ini Indonesia semakin terkoneksi dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Salah satu perkara yang menjadi perhatian para pakar dan pemangku kepentingan adalah kurang kompetitifnya Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga dalam praktik ekonomi yang terintegrasi tersebut. Terlebih, di dalam negeri Indonesia sendiri pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia antardaerah, khususnya antara pusat dan daerah, terlihat jelas ketimpangannya. Artikel ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penentu kesiapan daerah di Indonesia untuk berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebagai studi kasus, dipilih Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan baik secara kualitatif melalui wawancara mendalam, maupun secara kuantitatif melalui kuesioner. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri atas instansi-instansi yang menjadi pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Timur. Analisis data dilakukan melalui analisis SWOT.

**Kata kunci:** Kalimantan Timur, Masyarakat Ekonomi ASEAN, SWOT

**Abstract.** Until now, Indonesia is increasingly connected with other countries in Southeast Asia with the start of the ASEAN Economic Community. One of the issues that have attracted the attention of experts and stakeholders is that Indonesia is less competitive than neighboring countries in this integrated economic practice. Moreover, within Indonesia itself, economic development and human development between regions, especially between the center and the regions, are clearly visible. This article seeks to identify the determinants of regional readiness in Indonesia to participate in the ASEAN Economic Community. As a case study, East Kalimantan was chosen. Data was collected both qualitatively through in-depth interviews, and quantitatively through questionnaires. The key informants in this study consisted of institutions that were stakeholders in East Kalimantan Province. Data analysis was carried out through SWOT analysis.

**Keywords:** East Kalimantan, ASEAN Economic Community, SWOT

---

Correspondence author: Lukman Yudho Prakoso, [lukman.prakoso@idu.ac.id](mailto:lukman.prakoso@idu.ac.id)

## PENDAHULUAN

Globalisasi telah membuat antarbangsa di seluruh dunia semakin terhubung dan tergantung satu sama lain, khususnya melalui perdagangan dan investasi, perjalanan antardaerah dan antarnegara, serta persebaran budaya populer, sehingga batas-batas antarnegara pun semakin kabur. Negara-negara di seluruh dunia saling berinteraksi, bergantung, dan memengaruhi satu sama lain, termediasi oleh kekuatan pasar yang semakin terintegrasi (Ferdiansyah & Anthonius 120) sedemikian sehingga batas-batas teritorial antarnegara seolah tidak relevan lagi. Sejalan dengan pesatnya dinamika hubungan antarbangsa di berbagai kawasan, *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) yang beranggotakan sepuluh negara di Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja) juga menyadari bahwa integrasi kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi merupakan sebuah keniscayaan, sehingga dibentuklah *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (Koesrianti, Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Kerja sama ekonomi antarnegara anggota ASEAN telah dimulai sejak disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya (Koesrianti, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN)). Dalam perkembangannya, kerja sama ekonomi ASEAN yang diarahkan pada pembentukan MEA, pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerja sama di bidang politik-keamanan dan sosial-budaya. Setelah krisis ekonomi di akhir 1990-an, para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dalam bidang Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*), yang kemudian dikenal dengan Bali Concord II (ASEAN).

MEA telah mulai diberlakukan pada tahun 2015, dan diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada empat pilar gagasan. Pertama, menjadikan ASEAN pasar tunggal dan pusat produksi. Kedua, menjadikan ASEAN kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Terakhir, integrasi ke ekonomi global (Bahzar). Integrasi ekonomi ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. Sejalan dengan empat pilar gagasan tersebut, juga ditetapkan 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan, terdiri atas tujuh sektor barang, yaitu industri agro, perikanan, industri berbasis karet, industri tekstil dan produk tekstil, industri kayu dan produk kayu, peralatan elektronik, dan otomotif, serta lima sektor jasa, yakni transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi (Warsono 120-121). Saat ini, strategi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam partisipasinya di kancah MEA tertuang dalam *Cetak Biru MEA 2025*. Untuk masa implementasi 2016–2025, terdapat lima pilar yang terdiri atas (1) ekonomi yang terintegrasi dan terpadu, (2) ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis, (3) peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral, (4) ASEAN yang tangguh, berorientasi dan berpusat pada SDM, dan (5) ASEAN yang global (Ditjen PPI).

Integrasi berbagai sektor di antara negara-negara ASEAN, baik dalam skala regional maupun global tentunya akan membawa implikasi-implikasi, terutama terhadap pergerakan barang dan jasa yang semakin bebas. Integrasi tersebut akan membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia dengan hadirnya pasar bebas di kawasan ASEAN. Di antara dampak-dampak positif yang diharapkan adalah tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas produksi di tengah persaingan global (Warsono 129), mudahnya menjual produk UMKM ke berbagai negara ASEAN (Syukriah and Hamdani), serta mudahnya keluar-masuk tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN (Amalia).

Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang harus dihadapi, di antaranya derasnya investasi yang masuk ke Indonesia dapat menimbulkan eksploitasi sumber daya oleh perusahaan asing. Selain itu, tanpa keunggulan komparatif Indonesia juga akan dibanjiri oleh barang-barang impor yang akhirnya dapat mematikan produksi dalam negeri (Syukriah and Hamdani; Warsono 129). Dampak negatif tersebut juga dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap Pertahanan Negara, berupa maraknya kejahatan lintas negara seperti imigran ilegal, narkoba, teroris, perdagangan senjata, ataupun jenis kejahatan lintas negara lainnya.

Berkaca pada latar belakang di atas, tulisan ini hendak mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang memengaruhi kesiapan daerah di Indonesia dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebagaimana jamak diketahui, pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya merata di semua daerah. Sebagian provinsi telah terbangun dengan sangat maju, khususnya yang berada di Pulau Jawa; sementara sebagian lain, khususnya di Indonesia timur, masih jauh tertinggal. Hal ini tentu saja memengaruhi kesiapan tiap-tiap daerah dalam menyongsong MEA. Oleh karena itu, faktor-faktor penentu yang dibahas dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor yang berlaku di tingkat daerah, meskipun tentu saja terkait erat dengan situasi nasional Indonesia dan regional ASEAN. Dalam konteks riset ini, daerah yang menjadi fokus penelitian adalah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode campuran (*mixed method*) yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilaksanakan di Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19-23 Maret 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yakni diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam, dan kajian literatur. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa informan dari berbagai instansi terkait, seperti Pemerintah Provinsi Kaltim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kaltim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, serta Bea Cukai Samarinda. Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kaltim ditujukan untuk menggali data terkait aktivitas perindustrian dan perdagangan dihadapkan dengan pemberlakuan MEA. Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim ditujukan untuk menggali data terkait pengaruh pemberlakuan MEA terhadap pasar tenaga kerja di provinsi tersebut, khususnya untuk memahami kesiapan SDM Kaltim dalam memasuki lapangan pekerjaan yang semakin kompetitif dan tantangan yang harus mereka hadapi. Adapun



dengan Bea Cukai Samarinda, penggalan data ditujukan untuk mendapatkan gambaran terkait lalu lintas barang antarnegara pasca-pemberlakuan MEA.

Selain terhadap instansi-instansi pemerintahan daerah di atas, wawancara mendalam juga dilakukan kepada informan dari kalangan akademisi, yakni dari Pusat Studi ASEAN (PSA) Universitas Mulawarman, serta kepada informan dari kalangan militer, yakni dari Korem 091/ASN. Wawancara dengan akademisi dimaksudkan untuk membangun perspektif yang lebih sistematis dalam melihat faktor-faktor penentu kesiapan Kaltim dalam menghadapi MEA. Adapun dengan informan dari TNI, wawancara mendalam ditujukan untuk melihat pengaruh MEA terhadap pertahanan negara di Kaltim. Selanjutnya, pengumpulan data juga dilakukan melalui kegiatan FGD dengan mengundang narasumber dari beberapa instansi terkait, meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kaltim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Kadin Kaltim, Bea Cukai Kaltim, Korem 091/ASN, Kantor Imigrasi Kaltim, dan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Selain wawancara mendalam dan FGD, kepada para informan di atas, peneliti juga memberikan kuesioner untuk menggali data kuantitatif terkait persepsi mereka dalam mengidentifikasi faktor-faktor penentu kesiapan Kaltim dalam menghadapi MEA. Dengan demikian, dalam kuesioner ini, penentuan responden tidak dilakukan berdasarkan sampling acak (*random sampling*), melainkan berdasarkan kriteria tertentu yang menggambarkan kompetensi subjek yang bersangkutan sebagai responden. Kriteria yang dimaksud adalah responden merupakan pejabat yang berkiprah pada instansi-instansi di daerah yang terkait dengan bidang-bidang yang bersinggungan langsung dengan dampak pemberlakuan MEA. Kuesioner itu sendiri berisikan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya berdasarkan kajian literatur. Para informan kemudian diminta untuk memberikan penilaian (skor) terhadap masing-masing faktor berdasarkan persepsi mereka selama menjalankan tugas dan fungsi di bidang masing-masing. Penilaian ini meliputi dua macam, yakni (1) skor yang menunjukkan kualitas tiap-tiap faktor menurut informan dalam memengaruhi kesiapan Kaltim menghadapi MEA, serta (2) skor yang menunjukkan urgensi untuk mengambil tindakan-tindakan segera guna mengoptimalkan kontribusi faktor dimaksud dalam meningkatkan kesiapan Kaltim menghadapi MEA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia dengan pusat pemerintahan berada di Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam melimpah di mana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar diekspor ke luar negeri, sehingga Provinsi ini merupakan salah satu penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor pertambangan. Secara administratif, Provinsi ini berbatasan di sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Utara, sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak, Malaysia (BPS Kaltim 5).

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km<sup>2</sup> dan luas pengelolaan laut 25.656 km<sup>2</sup>, terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta di antara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Penduduk Kalimantan Timur tahun 2021 berjumlah 3,8 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan 0,84%. Jumlah penduduk ini tidak tersebar secara merata, di mana porsi penduduk terbesar berada di ibu kota provinsi, yakni Samarinda (21,83%), diikuti Kabupaten Kutai Kertanegara (19,26%) dan Balikpapan (18,26%). Ketimpangan persebaran penduduk juga terlihat dari komposisi 45,99% penduduk tinggal di beberapa kota yang luas totalnya hanya 1,09% dari luas keseluruhan Provinsi Kaltim (BPS Kaltim).

Provinsi ini mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1.500 meter di atas permukaan laut dan kemiringan antara 0-60%. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Adapun daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300%, terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budi daya komoditas-komoditas tertentu, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi. Dilihat dari topografi, sebagian besar atau 43,35% wilayah daratan termasuk dalam kemiringan di atas 40%, dan 43,22% terletak pada ketinggian 100-1.000 m di atas permukaan laut, sehingga pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut (*kaltimprov.go.id*).

Perekonomian Kalimantan Timur diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 652,48 triliun pada tahun 2019, kemudian Rp 607,59 triliun pada 2020 dan Rp 695,16 triliun pada 2021. Dikarenakan terutama oleh pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kaltim sempat terhambat, bahkan mencapai -2,87% pada 2020 dan hanya tumbuh 2,48% pada 2021. Padahal, sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 4,70% di tahun 2019. Perekonomian di Kaltim hingga 2021 masih didominasi oleh kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yakni sebesar 45,05% dari keseluruhan PDRB, disusul lapangan usaha industri pengolahan sebesar 17,81% dan konstruksi sebesar 8,95%. Namun demikian, lapangan usaha yang paling tinggi laju pertumbuhannya adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 13,34%, kemudian informasi dan komunikasi sebesar 7,96% serta konstruksi sebesar 4,41% (BPS Kaltim).

### Analisis SWOT

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui kajian literatur, peneliti telah mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan-kebijakan terkait pemberlakuan MEA di Kalimantan Timur. Faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal

No.	Faktor Internal
1	Geografis Indonesia yang strategis dalam mendukung ekspor impor
2	Sumber daya alam Indonesia yang melimpah
3	Jumlah penduduk Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar ASEAN
4	Koordinasi antar Lembaga





- 5 Luas wilayah Indonesia sebagai negara maritim
- 6 Arus bebas tenaga kerja
- 7 Pengawasan lalu lintas barang & orang
- 8 Ketersediaan Tenaga kerja terampil
- 9 Otonomi daerah
- 10 Arus bebas tenaga kerja

**Faktor Eksternal**

- 1 ASEAN Community sebagai mitra ekonomi global
- 2 Terbukanya Lapangan Pekerjaan
- 3 Potensi terbukanya Pasar baru di ASEAN
- 4 Peningkatan penilaian peringkat sebagai negara layak investasi
- 5 Pasar Bebas membuka peluang usaha industri kecil menengah
- 6 Eksploitasi SDA
- 7 Penyelundupan Orang
- 8 Ancaman siber
- 9 Penyelundupan Barang
- 10 Penyelundupan Narkoba

Hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di atas kemudian menjadi pijakan dalam melakukan analisis SWOT. Dalam menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal, penilaian didasarkan bukan pada pertimbangan subjektif peneliti, melainkan pada persepsi para responden. Dengan demikian, pemilahan faktor internal menjadi kekuatan dan kelemahan, maupun pemilahan faktor eksternal menjadi peluang dan ancaman ditentukan oleh para responden yang melakukan skoring terhadap faktor-faktor tersebut sesuai dengan kuesioner yang telah disiapkan sebagai instrumen penelitian.

*Analisis Kekuatan dan Kelemahan*

Penentuan kategori faktor-faktor internal menjadi kekuatan (S) dan kelemahan (W) didasarkan pada nilai rata-rata tiap-tiap faktor. Jika nilai rata-rata suatu faktor lebih besar daripada nilai rata-rata keseluruhan faktor internal, maka faktor tersebut dikategorikan sebagai kekuatan. Sebaliknya, jika nilai rata-ratanya di bawah nilai rata-rata keseluruhan faktor internal, maka faktor tersebut dikategorikan sebagai kelemahan. Hasil perhitungan nilai rata-rata untuk tiap-tiap faktor berdasarkan penilaian delapan orang responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Nilai rata-rata dan kategori tiap-tiap faktor internal.

No.	Faktor Internal	Rerata	Kategori
1	Posisi geografis Indonesia	8,33	S
2	Sumber daya alam Indonesia	7,00	S
3	Jumlah penduduk Indonesia	5,83	S
4	Koordinasi antarlembaga	5,83	S
5	Luas wilayah Indonesia	5,50	S
6	Infrastruktur dasar	4,67	W
7	Arus bebas tenaga kerja	4,33	W
8	Pengawasan	4,33	W

9	Ketersediaan tenaga kerja terampil	4,17	W
10	Otonomi daerah	1,67	W
<b>Jumlah</b>		<b>51,67</b>	
<b>Rerata Faktor Internal</b>		<b>5,17</b>	

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa nilai rata-rata untuk keseluruhan faktor internal adalah 5,17. Nilai inilah yang kemudian menjadi tolok ukur. Faktor-faktor yang memiliki nilai rata-rata di atas 5,17 dikategorikan sebagai kekuatan, sementara yang nilainya di bawah 5,17 dikategorikan sebagai kelemahan. Sesuai dengan tolok ukur tersebut, maka faktor-faktor internal yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan (S) meliputi posisi geografis, sumber daya alam, jumlah penduduk, koordinasi antarlembaga negara, dan luas wilayah. Adapun faktor-faktor internal yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan (W) meliputi infrastruktur dasar, arus bebas tenaga kerja, pengawasan, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan otonomi daerah. Lebih lanjut mengenai deskripsi masing-masing faktor tersebut, serta rasionalisasinya mengapa faktor tertentu dikategorikan sebagai kekuatan dan lainnya sebagai kelemahan, akan dijelaskan di bawah ini:

#### 1. Kekuatan (S)

##### a. Posisi geografis

Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Dalam perdagangan internasional dalam mendukung kegiatan ekspor-impor, posisi yang paling strategis berada di kawasan Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan. Namun demikian, jalur pelayaran yang terdapat di Selat Makassar di sebelah timur Kalimantan Timur juga termasuk jalur perdagangan yang cukup ramai. Dengan diberlakukannya MEA yang memfasilitasi perdagangan bebas internasional, maka posisi geografis yang strategis ini dapat pula menjadi kekuatan Provinsi Kaltim untuk mengambil manfaat dari perdagangan bebas internasional tersebut.

##### b. Sumber daya alam

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Demikian pula Provinsi Kaltim. Potensi sumber daya alam yang utama bagi Kaltim berupa komoditas pertambangan, baik migas maupun nonmigas (batu bara). Komoditas pertambangan ini bahkan menyumbang hingga 86–88% dari pendapatan daerah Kaltim [...]. Namun demikian, jajaran pemerintah daerah di Kaltim (baik provinsi maupun kabupaten/kota) menyadari bahwa hasil pertambangan bukanlah sumber daya alam yang lestari. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu mereka berusaha mengembangkan sektor-sektor lain untuk mengimbangi dominasi sektor pertambangan, seperti sektor pertanian dan perkebunan. Besarnya kontribusi sektor pertambangan inilah yang menjadikan faktor sumber daya alam di Kaltim, untuk saat ini, masih menjadi kekuatan.

##### c. Jumlah penduduk

Dengan jumlah penduduk mencapai 262 juta jiwa (menurut proyeksi tahun 2017), Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Untuk itu, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN Indonesia menjadi

pangsa pasar yang menjanjikan. Adapun Provinsi Kaltim, dengan jumlah penduduk sebanyak 3,8 juta jiwa (1,4% dari jumlah penduduk Indonesia), menempati urutan ke-19 dari 34 provinsi di Indonesia. Secara nasional, jumlah penduduk yang besar ini berpotensi menjadi pasar bagi berbagai produk industri.

d. Koordinasi antarlembaga negara

Terdapat perbedaan persepsi mengenai koordinasi antarlembaga, antara para narasumber di Jakarta dengan para narasumber di Kaltim. Berdasarkan hasil FGD di Jakarta, diperoleh pemahaman bahwa implementasi MEA di Indonesia lebih banyak terkendala oleh koordinasi antarlembaga yang masih kurang sinergis. Sementara itu, berdasarkan hasil penilaian kuesioner oleh para narasumber di Kaltim, terlihat bahwa koordinasi antarlembaga di tingkat pemerintahan daerah relatif sudah cukup baik. Para pemangku kepentingan di Kaltim memberikan penekanan pada fakta bahwa dalam kaitannya dengan implementasi MEA, mereka sekadar pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Kendala yang kerap terjadi justru muncul dari ketidak-sinkronan di antara kebijakan-kebijakan di tingkat pusat itu sendiri. Misalnya, kebijakan yang telah ditetapkan presiden kerap kali tidak terimplementasikan dengan baik karena adanya peraturan-peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaan yang justru tidak sesuai dengan kebijakan presiden tersebut. Dengan kata lain, para narasumber di Kaltim cenderung memersepsi positif koordinasi antarlembaga di jajaran pemerintahan daerah di Kaltim. Persoalan koordinasi muncul justru bukan dalam relasi antarlembaga di daerah, ataupun relasi antara pusat dan daerah, melainkan dalam relasi di antara lembaga-lembaga negara di tingkat pusat.

e. Luas wilayah

Indonesia merupakan negara dengan wilayah terluas di Asia Tenggara. Wilayah yang sangat luas ini berpotensi untuk mendukung pengembangan dan ekspansi berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Terlebih karena wilayah Indonesia juga memiliki penampakan yang majemuk, sehingga dapat dikembangkan dengan banyak cara. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan laut yang memiliki potensi perikanan dan pariwisata melimpah. Adapun Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas wilayah mencapai 129.066,64 km<sup>2</sup>, merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

2. Kelemahan (W)

a. Infrastruktur dasar

Salah satu permasalahan utama di Indonesia adalah pembangunan infrastruktur yang terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Adapun di berbagai daerah di luar Pulau Jawa, pembangunan infrastruktur berjalan sangat lambat. Demikian halnya di berbagai daerah di Pulau Kalimantan. Infrastruktur dasar berupa jalan raya dan listrik belum dapat memenuhi secara optimal kebutuhan masyarakat setempat, termasuk kebutuhan untuk pengembangan industri. Oleh karena itulah, salah satu kebijakan utama pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, khususnya di daerah perbatasan. Di



Kalimantan Timur sendiri, saat ini tengah dibangun jalan tol Balikpapan-Samarinda, yang akan disusul dengan pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang. Ruas tol Balikpapan-Samarinda telah diresmikan oleh Presiden RI pada tahun 2021. Pembangunan jalan tol yang menghabiskan biaya hingga Rp 10 triliun tersebut memperoleh pendanaan dari Pemerintah Daerah Kaltim (22,03 km), badan usaha jalan tol PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda (66,05 km), dan pemerintah pusat yang mendapatkan pinjaman dari China (11,09 km) (*Kompas*, 19 Maret 2018). Meskipun pembangunannya terus dilakukan, hingga penelitian ini dilaksanakan, keberadaan infrastruktur dasar dirasa masih belum mencukupi sehingga dipersepsi sebagai kelemahan.

b. Arus bebas tenaga kerja

Salah satu konsekuensi dari pemberlakuan MEA adalah terjadinya arus bebas tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN untuk beberapa kategori profesi. Hingga saat ini, sesuai dengan *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*, Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Individu (RAI) untuk 12 bidang jasa, yaitu jasa bisnis (akuntan, arsitek, rekayasa); komunikasi (pos, telekomunikasi, audiovisual); konstruksi; distribusi; pendidikan; lingkungan hidup; keuangan (bank dan non-bank); kesehatan dan sosial; pariwisata dan perjalanan; rekreasi, kebudayaan dan olahraga; angkutan (laut, udara, darat, dan kereta api); jasa-jasa lain (subsektor jasa energi) (Zami, Mardialina and Munir). Terkait dengan arus bebas tenaga kerja ini, kendala utama yang dialami Indonesia adalah kualitas SDM yang masih kurang kompetitif dibandingkan beberapa negara ASEAN lain. Berdasarkan indeks daya saing (*Global Competitiveness Index*) yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi 50 dunia atau posisi 4 Asia Tenggara; berada jauh di bawah Singapura (posisi 1 dunia), Malaysia (posisi 27 dunia), dan Thailand (posisi 40 dunia) (Nadya, Damia and Riza). Persoalan lain yang mengemuka adalah belum adanya standar yang disepakati bersama dan berlaku untuk semua negara ASEAN untuk sertifikasi tenaga kerja profesional.

Selain itu, dalam kegiatan pengumpulan data, Tim juga mendapati informasi bahwa di berbagai daerah di Indonesia telah masuk banyak tenaga asing di luar delapan kategori di atas, khususnya para tenaga kerja dari China. Mereka pada umumnya bekerja secara ilegal di berbagai proyek infrastruktur yang tengah dijalankan oleh pemerintah dengan melibatkan investasi dari China. Menurut sebagian narasumber, fenomena ini menyeruak bersamaan dengan pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan sejak tahun 2015. Di samping juga karena kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan dengan memangkas prosedur-prosedur yang dianggap memperlambat pengerjaan proyek, sehingga filterisasi dan pengawasan terhadap arus masuk tenaga kerja asing melemah.

c. Pengawasan barang dan orang

Salah satu konsekuensi dari perdagangan bebas adalah semakin banyak dan intensifnya pergerakan komoditas perdagangan antarnegara, baik berupa barang maupun jasa. Dengan demikian, diperlukan pula pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa barang maupun jasa yang masuk ke negara kita sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Merupakan tugas Kementerian Perdagangan dan jajaran dinas-dinas vertikal di bawahnya

untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk dari luar negeri. Adapun untuk tenaga kerja asing, yang berwenang melakukan pengawasan adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta dinas-dinas vertikal di bawahnya. Selain itu, tidak jarang dijumpai adanya warga negara asing yang bekerja di Indonesia, namun tidak memiliki visa kerja dan hanya berbekal visa kunjungan sebagai turis. Pada kasus-kasus ini, pengawasannya dilakukan oleh Ditjen Imigrasi Kemendikhum dan perwakilannya di daerah, karena status legal orang-orang asing ini bukanlah tenaga kerja, melainkan pelancong atau wisatawan. Untuk dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap keberadaan orang-orang asing di Indonesia, pemerintah telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di tingkat provinsi di mana Badan Kesbangpol bertindak sebagai koordinator. Yang saat ini menjadi permasalahan utama, ketersediaan SDM pengawas sangat terbatas dan tidak dapat mengimbangi banyaknya subjek yang harus diawasi.

d. Ketersediaan tenaga kerja terampil

Semakin sengitnya persaingan antarnegara di Asia Tenggara dan sekitarnya merupakan sebuah keniscayaan dari pemberlakuan MEA. Salah satu hal yang harus disiapkan untuk menghadapi persaingan ini tentu saja ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan ini, dibutuhkan lembaga-lembaga pendidikan baik formal untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik maupun nonformal untuk menghasilkan tenaga kerja terlatih. Terkait dengan hal ini, para responden cenderung memiliki persepsi yang negatif. Ketersediaan tenaga terampil saat ini dirasa masih jauh dari kebutuhan.

e. Otonomi daerah

Sebagai sebuah produk dari perjanjian internasional, MEA berada di tataran regional Asia Tenggara. Dalam implementasinya, produk perjanjian ini perlu diterjemahkan ke dalam hukum dan regulasi yang berlaku di tiap-tiap negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi MEA, pemerintah telah membuat berbagai produk hukum baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri sebagai aturan pelaksanaannya. Pada praktiknya, otonomi daerah dipersepsikan secara negatif oleh sebagian responden dan dianggap dapat menghambat proses implementasi ini karena ada kalanya daerah memiliki kepentingan yang berbeda dari pusat.

Namun demikian, sebagian narasumber juga mengungkapkan bahwa kondisi di atas seharusnya tidak menjadi kendala, jika kepala pemerintahan daerah di tingkat provinsi (gubernur) menyadari perannya sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah. Sebagai kepala daerah, gubernur tentu harus memperjuangkan kepentingan daerahnya. Akan tetapi, sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh presiden. Memainkan keseimbangan di antara kedua peran ini merupakan kunci untuk membuat otonomi daerah dan kebijakan implementasi MEA dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

### Analisis Peluang dan Ancaman

Penentuan kategori faktor-faktor eksternal menjadi peluang (O) dan ancaman (T) didasarkan pada nilai rata-rata tiap-tiap faktor. Jika nilai rata-rata suatu faktor lebih besar daripada nilai rata-rata keseluruhan faktor eksternal, maka faktor tersebut dikategorikan sebagai peluang. Sebaliknya, jika nilai rata-ratanya di bawah nilai rata-rata keseluruhan faktor eksternal, maka faktor tersebut dikategorikan sebagai ancaman. Hasil perhitungan nilai rata-rata untuk tiap-tiap faktor berdasarkan penilaian delapan orang responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Nilai rata-rata dan kategori tiap-tiap faktor eksternal.

No.	Faktor Eksternal	Rerata	Kategori
1	ASEAN Community	7,00	O
2	Terbukanya lapangan pekerjaan	5,50	O
3	Terbukanya pasar baru ( <i>e-commerce</i> )	5,33	O
4	<i>Investment Grade</i>	5,33	O
5	Pasar bebas	5,17	O
6	Eksplorasi SDA	4,83	T
7	Penyelundupan orang	4,50	T
8	Ancaman siber	4,17	T
9	Penyelundupan barang	4,00	T
10	Penyelundupan narkoba	3,67	T
<b>Jumlah</b>		<b>49,50</b>	
<b>Rerata Faktor Eksternal</b>		<b>4,95</b>	

Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa nilai rata-rata untuk keseluruhan faktor eksternal adalah 4,95. Nilai inilah yang kemudian menjadi tolok ukur. Faktor-faktor yang memiliki nilai rata-rata di atas 4,95 dikategorikan sebagai peluang, sementara yang nilainya di bawah 4,95 dikategorikan sebagai ancaman. Sesuai dengan tolok ukur tersebut, maka faktor-faktor eksternal yang dapat dikategorikan sebagai peluang (O) meliputi komunitas ASEAN, peningkatan kualitas SDM, *e-commerce*, *Investment grade*, dan pasar bebas. Adapun faktor-faktor eksternal yang dapat dikategorikan sebagai ancaman (T) meliputi eksploitasi sumber daya alam, penyelundupan orang, kejahatan siber, penyelundupan barang, dan penyelundupan narkoba. Lebih lanjut mengenai deskripsi masing-masing faktor tersebut, serta rasionalisasinya mengapa faktor tertentu dikategorikan sebagai peluang dan lainnya sebagai ancaman, akan dijelaskan di bawah ini:

#### 1. Peluang (O)

##### a. ASEAN Community

ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 oleh lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya, lima negara Asia Tenggara lainnya turut bergabung, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Inisiatif Indonesia memelopori pembentukan ASEAN memiliki nilai strategis bagi kestabilan geopolitik kawasan. Oleh karena, pada awal dasawarsa 1960-an itu hubungan Indonesia-Malaysia sedang memburuk akibat politik Konfrontasi, sementara di

dalam negeri Indonesia juga sedang “memulihkan diri” pasca-gejolak G30S/PKI. Dengan dibentuknya ASEAN, stabilitas politik di Asia Tenggara relatif dapat diperkuat sehingga Indonesia dapat memfokuskan diri pada pemulihan stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Dalam perkembangannya, KTT ASEAN Ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan Bali Concord II yang berisi kesepakatan untuk membentuk komunitas ASEAN di tiga bidang, yakni keamanan-politik (ASEAN Political-Security Community), ekonomi (ASEAN Economic Community), dan sosial budaya (ASEAN Socio-Culture Community) (ASEAN 2003). Adanya komunitas ASEAN ini kembali menjadi peluang bagi Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang di masa demokratisasi pasca-Reformasi 1998.

b. Peningkatan Kualitas SDM

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan Indeks Daya Saing Global tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-4 di Asia Tenggara, dan ke-50 di seluruh dunia (Nadya, Damia and Riza). Namun demikian, sejauh ini Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja profesional bersertifikasi ASEAN terbanyak. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian untuk tahun 2017, dalam dua bidang profesi yang telah disepakati di antara negara-negara ASEAN (keinsinyuran dan arsitektur), telah ada 1.975 tenaga profesional bersertifikasi ASEAN. Dari jumlah tersebut, 720 orang berasal dari Indonesia, disusul Singapura 313, Malaysia 280, Filipina 182, dan Vietnam 173.

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa secara kualitas Indonesia sebenarnya tidak tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain. Keadaan ini menjadi peluang bagi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun demikian, jumlah tenaga profesional tersebut masih terlampau kecil untuk mengimbangi kebutuhan pembangunan yang sebanding dengan luasnya wilayah dan besarnya penduduk Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM masih harus diprioritaskan.

c. E-Commerce

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar pada aktivitas ekonomi. Salah satu yang kemudian mengemuka, khususnya dengan perkembangan cepat internet, adalah terjadinya *e-commerce*, yakni perdagangan yang tidak lagi berlangsung secara tatap muka, melainkan melalui perantaraan teknologi komunikasi. Dampak utamanya, pasar sebagai sebuah institusi ekonomi mengalami transformasi hingga melampaui batas-batas negara. Saat ini bukan saja perdagangan dalam skala besar, tetapi hampir semua aktivitas perdagangan dapat dilakukan lintas negara melalui jual-beli daring. Oleh karena itu, pengembangan perekonomian ke depan harus mempertimbangkan *e-commerce* sebagai peluang yang tidak boleh disia-siakan.

d. Investment Grade

*Investment Grade* merupakan status yang diberikan oleh beberapa lembaga internasional kepada negara-negara yang dianggap layak investasi. Pada tahun 2017, Indonesia memperoleh Investment Grade dari tiga lembaga, yakni Moody’s Investor Services, Standard & Poor’s (S&P), dan Fitch Rating. Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya, ketahanan Indonesia dalam menghadapi guncangan faktor global selama beberapa tahun terakhir, kebijakan makroekonomi yang berhasil menjaga kestabilan, serta

kebijakan moneter yang sejak pertengahan 2013 telah mencegah keluarnya aliran modal asing dari Indonesia. Dengan dicapainya status *Investment Grade*, Indonesia diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat, seperti kemudahan menjaring investasi asing dan meningkatnya nilai surat berharga atau obligasi RI.

e. Pasar Bebas

Terdapat kecenderungan untuk melihat pasar bebas layaknya pedang bermata dua. Di satu sisi, pasar bebas dapat menjadi peluang, namun di sisi lain dapat juga menjadi ancaman. Terutama jika daya saing global suatu negara lemah, terbukanya pasar bebas hanya akan membanjiri negara tersebut dengan komoditas asing, sehingga hasil-hasil produksi dalam negeri akan tergerus. Kendati demikian, para narasumber dan responden di Kalimantan Timur memiliki persepsi yang cenderung positif terhadap pemberlakuan pasar bebas. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan kondisi ekonomi terkuat di Indonesia, khususnya karena didukung oleh sektor pertambangan migas dan nonmigas. Selain itu, secara nasional, meski bukan yang terbaik di ASEAN, namun Indonesia memiliki daya saing untuk menghadapi kompetisi sengit pasar bebas.

2. Ancaman (T)

a. Eksploitasi SDA

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, upaya untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi pada umumnya dilakukan dengan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Upaya semacam ini kerap dilakukan dengan menghadirkan investasi, khususnya investasi asing, ke daerah-daerah yang memiliki kekayaan SDA. Efek negatif yang kemudian sering terjadi adalah berlangsungnya eksploitasi SDA, di mana masyarakat setempat memperoleh manfaat sedikit saja dari kegiatan industrial tersebut. Oleh karena itu, kehadiran investor dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi harus senantiasa dikelola dan diawasi dengan bijak, agar tidak berujung pada eksploitasi SDA semata.

b. Penyelundupan Orang

Dengan semakin terintegrasinya perekonomian suatu kawasan, salah satu hal yang tidak terhindarkan adalah meningkatnya arus pergerakan lintas negara pekerja migran. Dalam praktiknya, pergerakan para pekerja migran ini kerap dimanfaatkan sindikat perdagangan orang untuk melakukan penyelundupan manusia. Hal ini biasanya terjadi dari negara yang secara ekonomi lebih lemah atau rentan ke negara yang secara ekonomi lebih kuat. Dalam konteks Indonesia, arus pergerakan pekerja migran kerap terjadi dari Indonesia ke beberapa negara lain, terutama Malaysia dan Singapura. Salah satu penyebabnya, karena lapangan kerja di daerah asal sangat terbatas, sementara negara tetangga menyediakan jumlah dan jenis lapangan kerja yang lebih banyak, beserta upah yang relatif lebih tinggi.

Menurut beberapa hasil studi, penyelundupan orang yang menimpa warga negara Indonesia untuk dijadikan pekerja ilegal di Malaysia dan



Singapura kerap terjadi di perbatasan lintas negara antara Kepulauan Riau (khususnya Batam) dan Johor. Adapun di bagian timur Indonesia, penyelundupan manusia kerap terjadi di perbatasan antara Kalimantan Utara (khususnya Nunukan) dan Sabah (khususnya Tawau). Dalam konteks perdagangan jasa yang semakin terintegrasi di antara negara-negara ASEAN, penyelundupan manusia dan perdagangan orang tentu akan menjadi ancaman jika tidak ditangani dengan baik.

c. Kejahatan Siber

Kejahatan siber (*cyber crime*) juga terus berkembang seiring kemajuan di bidang teknologi informasi. Melalui pemanfaatan jaringan internet, kejahatan ini dapat dengan mudah terjadi melewati batas-batas negara. Bentuk kejahatan ini juga dapat menjadi ancaman yang serius bagi integrasi ekonomi khususnya dalam konteks MEA. Salah satunya, karena semakin banyak bentuk-bentuk perdagangan yang dilangsungkan melalui *e-commerce*. Selain itu, transaksi perbankan juga semakin terintegrasi dengan lalu lintas data melalui jaringan internet. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang semakin terintegrasi dengan teknologi informasi tentu riskan terhadap kejahatan-kejahatan siber.

d. Penyelundupan Barang

Salah satu manfaat yang diharapkan dari pembukaan pasar bebas adalah berkurangnya secara drastis penyelundupan barang antarnegara. Hal ini karena pemberlakuan tarif masuk barang yang sangat minim, bahkan mencapai 0%, dapat menekan biaya untuk melakukan lalu lintas barang secara legal. Akan tetapi, pada kenyataannya masih saja terjadi penyelundupan beberapa jenis barang di daerah-daerah perbatasan. Misalnya, yang terjadi di titik-titik tertentu di daerah perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan. Barang-barang yang diselundupkan ini pada umumnya berupa barang-barang kebutuhan pokok. Penyebab utamanya, sulitnya memenuhi pasokan barang dari dalam negeri untuk masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, terutama karena keterbatasan akses dan infrastruktur. Dengan kata lain, ancaman berupa penyelundupan barang ini sebenarnya mencerminkan juga belum terintegrasinya dengan baik perekonomian daerah perbatasan dengan perekonomian dalam negeri.

e. Penyelundupan Narkoba

Pada tahun 2016, dalam pidatonya memperingati Hari Anti-Narkotik Internasional, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Kecuali ganja, hampir semua narkoba yang beredar secara ilegal di Indonesia berasal dari luar negeri, khususnya Cina, dan masuk melalui Malaysia. Semakin bebasnya lalu lintas orang antarnegara, jika tidak diawasi dengan baik, akan melipatgandakan kemungkinan terjadinya penyelundupan dan perdagangan gelap narkoba.

### *Relasi Faktor Internal dan Eksternal*

Setelah mengidentifikasi dan memberikan penilaian pada dimensi kekuatan dan kelemahan faktor-faktor internal, serta peluang dan ancaman faktor-faktor eksternal, langkah selanjutnya adalah memperbandingkan relasi di antara faktor-faktor internal dan eksternal tersebut. Untuk dapat membuat relasi perbandingan ini,

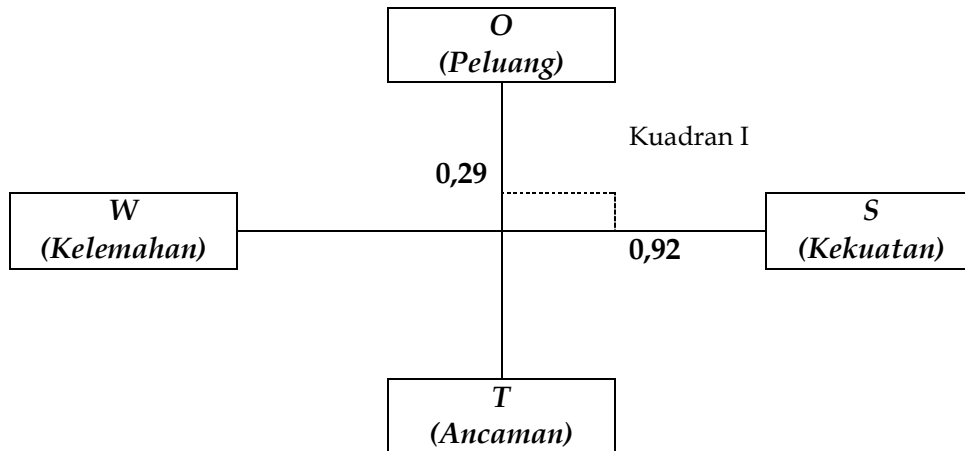
terlebih dahulu kita harus membuat pembobotan lebih lanjut untuk tiap-tiap faktor. Hasil pembobotan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Pembobotan faktor-faktor internal dan eksternal

No.	Faktor	Rerata	Bobot	Rating	Skor
<b>FAKTOR INTERNAL</b>					
<i>Kekuatan (S)</i>					
1	Posisi geografis Indonesia	8,33	0,16	3,17	0,51
2	Sumber daya alam Indonesia	7,00	0,14	3,67	0,51
3	Jumlah penduduk Indonesia	5,83	0,11	3,33	0,37
4	Koordinasi antarlembaga	5,83	0,11	3,33	0,37
5	Luas wilayah Indonesia	5,50	0,11	3,33	0,37
<b>Jumlah Skor Kekuatan</b>					2,12
<i>Kelemahan (W)</i>					
6	Infrastruktur dasar	4,67	0,09	3,67	0,33
7	Arus bebas tenaga kerja	4,33	0,08	3,50	0,28
8	Pengawasan	4,33	0,08	3,33	0,27
9	Ketersediaan tenaga kerja terampil	4,17	0,08	3,33	0,27
10	Otonomi daerah	1,67	0,03	1,83	0,05
<b>Jumlah Skor Kelemahan</b>					1,20
<b>Jumlah Faktor Internal</b>		51,67	1,00		
<b>Selisih Skor (S-W)</b>					<b>0,92</b>
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>					
<i>Peluang (O)</i>					
1	ASEAN Community	7,00	0,14	2,83	0,40
2	Terbukanya lapangan pekerjaan	5,50	0,11	3,17	0,35
3	Terbukanya pasar baru (e-commerce)	5,33	0,11	2,83	0,31
4	Investment Grade	5,33	0,11	3,33	0,37
5	Pasar bebas	5,17	0,10	3,33	0,33
<b>Jumlah Skor Peluang</b>					1,76
<i>Ancaman (T)</i>					
6	Eksplorasi SDA	4,83	0,10	3,50	0,35
7	Penyelundupan orang	4,50	0,09	3,50	0,32
8	Ancaman siber	4,17	0,08	3,50	0,28
9	Penyelundupan barang	4,00	0,08	3,50	0,28
10	Penyelundupan narkoba	3,67	0,07	3,50	0,25
<b>Jumlah Skor Ancaman</b>					1,47
<b>Jumlah Faktor Eksternal</b>		49,50	1,00		
<b>Selisih Skor (O-T)</b>					<b>0,29</b>

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dibuatlah diagram analisis SWOT, yang menunjukkan bahwa posisi strategi terpilih terletak pada kuadran I (0,92; 0,29). Dengan posisi ini, maka strategi terpilih tersebut termasuk ke dalam strategi S-O,

yakni strategi yang berorientasi pada pemanfaatan peluang untuk meningkatkan kekuatan. Posisi strategi ini dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Posisi Strategi Terpilih Berdasarkan Hasil Analisis SWOT

Setelah mendapatkan posisi kuadran di atas, maka peneliti berupaya menyusun beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan daerah di Indonesia dalam menghadapi MEA, khususnya Provinsi Kaltim. Hasil perbandingan relasi faktor-faktor internal dan eksternal, serta alternatif strategi yang dapat dilakukan, disajikan dalam Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Relasi faktor internal dan eksternal

	<b>KEKUATAN: 2,12</b>	<b>KELEMAHAN: 1,20</b>
	(1) Posisi geografis Indonesia (2) SDA Indonesia (3) Jumlah penduduk (4) Koordinasi antarlembaga (5) Luas wilayah Indonesia	(1) Infrastruktur dasar (2) Arus bebas tenaga kerja (3) Pengawasan (4) Ketersediaan tenaga kerja terampil (5) Otonomi daerah
<b>PELUANG: 1,76</b>	<b>STRATEGI S-O: 3,88</b>	<b>STRATEGI W-O: 2,96</b>
(1) ASEAN Community (2) Peningkatan kualitas SDM (3) E-commerce (4) Investment Grade (5) Pasar Bebas	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mempercepat pembangunan infrastruktur</li> <li>➢ Meningkatkan Kualitas &amp; kesempatan untuk SDM pekerja lokal</li> <li>➢ Pengawasan masuknya lintas barang dan orang</li> <li>➢ Mengoptimalkan Usaha kecil Menengah berorientasi ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meningkatkan Kualitas SDM</li> <li>➢ Implementasi Kebijakan SDA</li> <li>➢ Membatasi Masuknya Pekerja Asing</li> <li>➢ pengawasan masuknya lintas barang dan orang</li> </ul>
<b>ANCAMAN: 1,47</b>	<b>STRATEGI S-T: 3,59</b>	<b>STRATEGI W-T: 2,67</b>
(1) Eksploitasi SDA (2) Penyelundupan orang (3) Kejahatan siber (4) Penyelundupan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menambah sarana patroli di laut</li> <li>➢ Implementasi Kebijakan Cetak Biru MEA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Memberikan Pelatihan spesialisasi bagi TKL</li> <li>➢ Menyediakan Infrastruktur dasar</li> </ul>

(5) Penyelundupan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koordinasi antar lembaga</li> <li>➤ Memaksimalkan pelibatan TNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menambah personil pengawasan</li> <li>➤ <i>Law enforcement</i></li> </ul>
---------------------------	---	--

Berdasarkan perbandingan relasi antarfaktor internal dan eksternal sebagaimana tertuang pada tabel di atas, kita dapat mengetahui urutan prioritas strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi pemberlakuan MEA. Urutan prioritas strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi S-O, dengan skor 3,88. Dalam strategi ini, langkah yang harus dilakukan berupa upaya-upaya untuk mengoptimalkan kekuatan guna mengambil manfaat sebesar-besarnya dari peluang yang ada.
2. Strategi S-T, dengan skor 3,59. Dalam strategi ini, langkah yang harus dilakukan berupa upaya-upaya untuk mengoptimalkan kekuatan guna meminimalkan dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh ancaman yang ada.
3. Strategi W-O, dengan skor 2,96. Dalam strategi ini, langkah yang harus dilakukan berupa upaya-upaya untuk mereduksi kelemahan guna mengambil manfaat sebesar-besarnya dari peluang yang ada.
4. Strategi W-T, dengan skor 2,67. Dalam strategi ini, langkah yang harus dilakukan berupa upaya-upaya mereduksi kelemahan guna meminimalkan dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh ancaman yang ada.

Berdasarkan pilihan strategi yang memiliki skor tertinggi, yakni strategi S-O, selanjutnya dirumuskan rincian langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi pemberlakuan MEA. Langkah-langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. mempercepat pembangunan infrastruktur;
2. meningkatkan kualitas SDM pekerja lokal dan kesempatan kerja bagi mereka;
3. meningkatkan pengawasan lalu lintas barang dan orang antarnegara;
4. mengoptimalkan usaha kecil menengah berorientasi ekspor.

## SIMPULAN

Dunia yang semakin terintegrasi menjadi sebuah pasar global merupakan sebuah fakta yang tidak mungkin dimungkiri. Sekalipun proses globalisasi dewasa ini sempat “tertunda” sejenak karena pandemi Covid-19 sejak 2020 dan belum sepenuhnya pulih kembali hingga 2022 ini, namun prosesnya terus berjalan dan tidak mungkin diputar mundur. MEA adalah bagian dari proses tersebut. Selama ini, tatkala mendiskusikan pasar bebas, kerap kali perspektif kita terkonstruksi pada unit-unit negara sebagai aktor utama. Padahal, sebagaimana kita lihat pada kasus Indonesia, dalam sebuah negara pun terdapat keragaman dan ketimpangan antardaerah, sehingga tiap-tiap daerah dapat saja terikat pada faktor-faktor yang berbeda dalam menghadapi fenomena integrasi pasar yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini telah mencoba menyelidik kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA pada tataran daerah. Namun demikian, penelitian ini tetap memiliki limitasi, yakni hanya terfokus pada satu provinsi (dari 34) di Indonesia. Penelitian serupa yang mencakup beberapa provinsi sekaligus merupakan sebuah ikhtiar yang dapat dilakukan di masa depan

untuk mendapatkan pengetahuan yang sifatnya komparatif, sehingga keragaman antardaerah tersebut dapat lebih dipahami secara empiris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Aisyah. "Menganalisa Dampak MEA terhadap Tenaga Kerja Dalam Negeri di Indonesia." *Jurnal Development* 6.1 (2018).
- ASEAN. "Declaration of ASEAN Concord II, Bali, Indonesia." 2003.
- Bahzar, M. "Perguruan Tinggi dan Revolusi Mental Bangsa dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Seminar Nasional Peran Pendidikan Tinggi dalam Menyiapkan SDM untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*. Samarinda: Universitas Mulawarman, 2015.
- BPS Kaltim. *Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2022*. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2022.
- Ditjen PPI. *Cetak Biru MEA 2025: Masa Implementasi 2016-2025*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI (Ditjen PPI), 2018.
- Ferdiansyah dan Se Tin Anthonius. "Globalisasi Ekonomi, Integrasi Ekonomi Global, Dinamika Pasar Modal & Kebutuhan Standar Akuntansi Internasional." *Jurnal Akuntansi* 8.1 (2016): 119-130.
- Koesrianti. *Association of South East Asian Nations (ASEAN): Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- . "Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) 2015: Integrasi Ekonomi Berdasar Komitmen Tanpa Sanksi." *Jurnal Law Review* 8.2 (2013).
- Nadya, Damia dan Riza. "Perkembangan Indeks Daya Saing Global: Indonesia." *Referensi* No. 02/ref.PKA/VI/2020 (2020).
- Syukriah, Ana dan Imam Hamdani. "Peningkatan Eksistensi UMKM melalui Comparative Advantage dalam rangka Menghadapi MEA 2015 di Temanggung." *Economics Development Analysis Journal* 2.2 (2013).
- Warsono. "Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)." *Majalah Manajemen dan Bisnis Ganesha* 1.2 (2015).
- Zami, A. Z., M. Mardialina dan A. M. Munir. "Peluang Indonesia dalam Kerangka Kerjasama ASEAN di Bidang Kesehatan melalui ASEAN Framework Agreement on Services Paket 10." *Indonesian Journal of Global Discourse* 2.1 (2020): 85-98.